

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Granit.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahrnja. (2002). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hendar dan Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Hendrojogi. (2004). *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Cetakan 6. Jakarta: RajaGrafindo.
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Munir, Fuady. (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pachta, Andjar. W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay. (2018). *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Cetakan I. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sastrawidjaja, Man S. (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cetakan ke-3. Bandung: Alumni.
- Shubhan, Hadi. (2009). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- _____. (2018).
- Suharsomno, Fiensho. (2010). *Kamus Hukum*. Jonggol: Van Delta' Publishing.
- Waluyo, B. (1999). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Widiyanti, Ninik dan Y. W. Sunindhia. (2003). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing. 2019.
- Yussarie, Emmy. (2005). *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

B. Jurnal

- Damalah, Juditia. (2017). *Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Lex Crimen, 6(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15348>.
- H, Ondang, Q. (2017). *Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang*

Nomor 37 Tahun 2004. *Lex et Societatis*, 5 (7). <https://doi.org/10.35796/lex.v5i7.18086>.

Mantili, Rai dan Putu Eka Trisna Dewi. (2021). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*. *Jurnal Aktual Justice*, 6 (1). <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>

Mukhid, Abdul dan Hidayatullah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4). <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26768>

Simanjuntak, Herry Anto. (2020). *Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur*. *Justica*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.36764/justiqa.v2i2.458>.

Simanjuntak, Steven Paskah Lamhot Afriedinata. (2023). *Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn)*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2 (7). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.216>.

Suharto, Rachmat. (2019). *Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi*. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 3 (1). <https://doi.org/10.25139/lex.v3i1.1816>

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan tanggal 18 Agustus 2022.

D. Lain-lain

Aritonang, R. & Mulyadi, R.. 2021. *Nasabah Gugat CU Satolop Soal Puluhan Miliar Simpanan Di "Zona Pupus"*, Sumut.antaranews.com, diakses dari <https://sumut.antaranews.com/berita/425577/nasabah-gugat-cu-satolop-soal-puluhan-miliar-simpanan-di-zona-pupus>

Dewi, Mahayu Yustisia Kartika. 2022. *Analisis Yuridis Atas Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Diputus Pailit (Kasus Putusan Pailit Ksp Multidana)*, Master tesis, Undip Repository.

Editor HukumOnline.Com, *Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU*, diakses pada 29 September 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-memperjelas-koperasi-dalam-proses-kepailitan-dan-pkpult61f51d9d81b69/>

Hanif, Rifqani Nur F. 2020. *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*, Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Heriani, Fitri N. 2015. *Enam Kesalahan UU Kepailitan*, hukumonline.com, diakses pada 24 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/enam-kesalahan-uu-kepailitan-lt561737ed1a1cb/>

Hilmy F. Ali. 2023. *Manfaat PKPU dalam Penyelesaian Utang Piutang*, hukumonline.com., diakses pada 24 Oktober 2023,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/manfaat-pkpu-dalam-penyelesaian-utang-piutang-cl1861/>

Johnson & Pranoto, S. 2022. *Pengadilan Nyatakan CU Satolop Siborongborong Pailit, Bagaimana Nasib Anggota? Begini Kata Tim Kurator*, Medanbisnisdaily.com, diakses dari https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/08/25/160331/pengadilan_nyatakan_cu_satolop_siborongborong_pailit_bagaimana_nasib_anggota_begini_kata_tim_kurator/

M. Hadi Shubhan. 2006. *Prinsip Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Disertasi tesis, Universitas Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/32468>.

Nindita Widi Afreeporamara. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Pailitnya Koperasi Simpan Pinjam*, uns.ac.id.

Roedjiono, Z. 2018. *Pengaruh Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Terhadap Kewenangan Debitur Sebagai Pihak Dalam Proses Gugatan Perdata Pada Pengadilan Negeri*. Tesis. Repository Universitas Gajah Mada.

Satrio, *Pengurusan Kepailitan*, diakses pada 24 Oktober 2023, dari <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-kepailitan#:~:text=Pengurusan%20Kepailitan%20adalah%20pemberian%20layanan,diatur%20dalam%20Undang%20Undang%20Kepailitan>